

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB SERAP GABAH SEGALA KUALITAS OLEH PERUM BULOG KANWIL LAMPUNG

Oleh

ALYA ADILA

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah menjadi dasar pelaksanaan kebijakan wajib serap gabah tanpa standar kualitas sebagai upaya melindungi petani dan menjaga stabilitas harga gabah, khususnya pada masa panen raya. Regulasi ini diterbitkan sebagai respons atas permasalahan harga gabah yang sering berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), keterbatasan penyerapan gabah oleh BULOG, serta rendahnya kepastian pasar bagi petani. Kebijakan ini melibatkan berbagai aktor, seperti Perum BULOG, Badan Pangan Nasional, Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan, Babinsa, serta kelompok tani, sehingga menuntut koordinasi dan komunikasi lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut oleh Perum BULOG Provinsi Lampung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di tingkat lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi dalam mengatur proses penyerapan gabah. Meskipun kebijakan ini dipersepsikan positif oleh petani karena mampu menjaga stabilitas harga dan memperluas akses penjualan gabah, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan operasional yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ke depan.

Kata Kunci: Kebijakan publik, Ketahanan pangan, Implementasi kebijakan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE MANDATORY RICE PADDY ABSORPTION POLICY FOR ALL QUALITY LEVELS BY PERUM BULOG IN LAMPUNG PROVINCE

By

ALYAADILA

Presidential Instruction Number 6 of 2025 on the Procurement and Management of Domestic Rice Paddy/Rice and the Distribution of Government Rice Reserves serves as the legal basis for the implementation of the mandatory rice paddy absorption policy without quality standards as an effort to protect farmers and maintain rice price stability, particularly during the peak harvest season. This regulation was issued in response to several problems, including rice paddy prices often falling below the Government Purchasing Price (HPP), limited absorption capacity by BULOG, and the lack of market certainty for farmers. The policy involves various actors, such as Perum BULOG, the National Food Agency, the Agricultural Office, Agricultural Extension Officers, Babinsa, and farmer groups, which requires cross-sectoral coordination and communication. This study aims to analyze the implementation of the policy by Perum BULOG in Lampung Province and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation at the field level. The research employs a qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that policy implementation is influenced by policy communication, the availability of resources, implementers' commitment, and the bureaucratic structure in managing the rice paddy absorption process. Although farmers generally perceive this policy positively because it helps stabilize rice paddy prices and expand access to market sales, its implementation still faces several technical and operational challenges that require improvement to enhance policy effectiveness in the future.

Key Words: Public policy, Food security, Policy implementation.